

**OPTIMALISASI PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI  
(SIM) KELILING PADA POLRESTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh:**

**MIKE DESTRI DORA  
NIM : 89018/2007**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

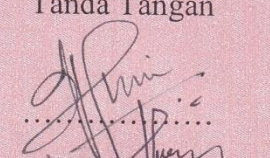

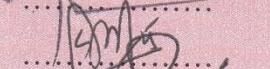
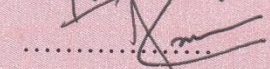

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Jumat 6 Januari 2012 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

### Optimalisasi Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Pada Polresta Padang

Nama : Mike Destri Dora  
NIM : 2007/89018  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

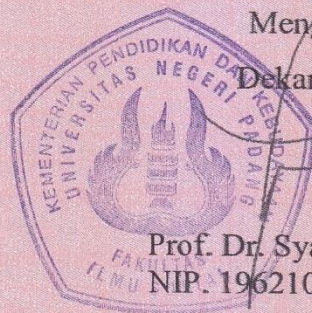
Padang, 6 Januari 2012

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	
Sekretaris	: Lince Magriasti, S.IP, M.Si	
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## ABSTRAK

### **Mike Destri Dora. 2007/89018 Optimalisasi Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Pada Polresta Padang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pelayanan SIM keliling yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang karena masih adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang seperti kurangnya sumberdaya manusia, anggaran yang terbatas, dan kendala dalam pengoperasian sarana pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan standar pelayanan publik pada pelayanan SIM keliling Polresta Padang; 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat; dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumenter. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan langkah sebagai berikut reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling Polresta Padang belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang dikarenakan masih adanya beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala antara lain minimnya SDM petugas terutama petugas operator, anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang terkendala dengan kerusakan pada alat-alat pelayanan. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang, upaya yang dilakukan pihak Polresta Padang antara lain meningkatkan SDM petugas dengan mengikuti pelatihan operator komputerisasi administrasi SIM di Dirlantas Polri, mengajukan penambahan anggaran dari pusat yakni Mabes Polri, serta memperbaiki kerusakan sarana. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pihak Polresta Padang untuk menambah anggota personil yakni petugas kepolisian dan menambah sarana pendukung seperti genset agar pelayanan SIM keliling kepada masyarakat lebih lancar. Selain itu agar Polresta Padang dapat mengembangkan acara-acara yang dapat menarik peminat masyarakat pemohon SIM.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil a'lamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Optimalisasi Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Pada Polresta Padang”**. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu Lince Magriasti, S.IP. M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. Nurman, S. M.Si, Ibu Dra. Al Rafni, M.Si, serta Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Poltik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Walikota Padang dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang yang telah mengeluarkan izin penelitian ini.
8. Bapak Kepala Polresta Padang yang telah mengeluarkan izin penelitian.
9. Bapak Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, Bapak Kepala Seksi SIM Ditlantas Polda Sumbar, Bapak Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polresta Padang, Petugas Pelayanan SIM Keliling Polresta Padang serta masyarakat yang telah membantu dalam penelitian ini.
10. Kedua orangtua (Drs. Mohd. Nasir B. dan Asnimar Salam), Abang, Kakak dan adik-adik (Deri Febri Jusipa, S.S.T, Rezi Novia Riska, SE, Widya Pita Loka, dan Tesa Uci Yugita), serta seluruh keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dan materil.

11. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2007, terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Padang, Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teoritis .....	10
1. Konsep Pelayanan Publik .....	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan .....	18
3. Konsep Pelayanan SIM Keliling .....	24
B. Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Informan Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	33

F. Teknik Menguji Keabsahan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	37
B. Temuan Khusus .....	42
C. Pembahasan .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Laporan Rekap Produksi SIM.....	5
Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1. Biaya Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual .....	30
Gambar 4.1. Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.....	38
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.....	42
Gambar 4.3. Prosedur Pelayanan SIM Keliling Polresta Padang .....	44
Gambar 4.4. Masyarakat Mengisi Formulir Permohonan.....	45
Gambar 4.5. Masyarakat Melakukan Foto SIM.....	46
Gambar 4.6. Masyarakat Melakukan Sidik Jari.....	46
Gambar 4.7. Kendaraan Operasional Pelayanan SIM Keliling Polresta Padang .....	52
Gambar 4.8. Alat-alat Pelayanan Pada Mobil Unit pelayanan SIM Keliling Polresta Padang .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas administrasi pemerintahan. Pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hak tersebut merupakan hak konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, dan harus dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah. Pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Widodo menjelaskan dalam Prianto (2006:1) pada dasarnya para pegawai negeri adalah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat. Seiring dengan itu Rasyid dalam Prianto (2006:1) mengatakan para pegawai negeri diadakan tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan agar setiap anggota masyarakat bisa mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tujuan bersama.

Haryono menjelaskan dalam Prianto (2006:5) salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah adalah apabila masing-masing daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara praktis, pelayanan

publik yang berkualitas merupakan salah satu kunci yang harus diambil oleh pemerintah untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pelayanan SIM khususnya perpanjangan SIM kepada masyarakat, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2007 Tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Mobil Unit Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Untuk Golongan A, Golongan C, dan Golongan D. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2007 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, birokrasi yang mudah dan akuntabilitas publik yang memadai.

Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 juga dijadikan acuan SOP (*Standar Operating Procedure*) yaitu Prosedur Operasi Standar yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk bagi petugas penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan dengan harapan transparansi mengenai persyaratan, biaya yang harus disetor dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), prosedur pelayanan dan transparansi mengenai jadwal penyelesaian.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada Kantor Polresta Padang, masalah yang penulis lihat adalah belum optimalnya pelayanan publik pada unit pelayanan SIM keliling Polresta Padang yang dapat dilihat dari aspek biaya pelayanan. Penulis melihat bahwasanya dari segi biaya pelayanan, tidak adanya tranparansi mengenai rincian biaya pelayanan yang dikenakan

kepada masyarakat. Walaupun mengenai biaya pelayanan perpanjangan SIM secara jelas diatur dalam perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun menurut hasil pengamatan langsung yang penulis temukan bahwa biaya pelayanan perpanjangan SIM tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan karena masih adanya pungutan biaya lain yang dikenakan kepada masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM mereka.

Beberapa studi menunjukkan bahwa akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja pelayanan publik adalah prosedur yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan (Ratminto & Atik, 2006: 107).

Kurang optimalnya pelayanan SIM keliling pada Polresta Padang juga dapat dilihat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana. Walaupun di dalam pelaksanaannya, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan SIM keliling Polresta Padang sudah cukup memadai untuk dapat memberikan pelayanan serta kenyamanan pada masyarakat yang mengakses pelayanan, akan tetapi masih ada kendala yang ditemui dalam pengoperasian sarana yang ada tersebut.

Menurut bapak Bripka Ridwan selaku petugas mobil unit pelayanan SIM keliling Polresta Padang menyatakan, bahwa untuk dapat melaksanakan pelayanan SIM keliling pada masyarakat di Kota Padang khususnya, pihak Polresta Padang

sendiri memiliki satu unit kendaraan operasional berupa mobil SIM keliling lengkap dengan alat-alat pelayanan di dalamnya. Untuk dapat mengoperasikan alat-alat pelayanan tersebut menggunakan mesin diesel. Tidak jarang mesin diesel mengalami kerusakan. Jika mesin diesel rusak, otomatis untuk sementara waktu petugas tidak dapat memberikan pelayanan SIM keliling kepada masyarakat. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan pelayanan SIM keliling kepada masyarakat.

Di dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwasanya ada 6 standar pelayanan publik yang harus ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. Berdasarkan standar pelayanan tersebut, permasalahan lain yang penulis lihat di dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang adalah masih minimnya ketersediaan SDM petugas yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 12 Tahun 2007 telah ditetapkan bahwa yang menjadi petugas operator mobil unit pelayanan SIM keliling merupakan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang memiliki kualifikasi telah mengikuti Pelatihan Operator Komputerisasi Administrasi SIM (KA-SIM). Yang menjadi kendala yaitu masih kurangnya tenaga petugas yang

memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk ditugaskan pada unit pelayanan SIM keliling.

Jika dicermati, sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas akan berpotensi menyebabkan terganggunya proses dan bahkan *output* serta *outcome* yang diharapkan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari data yang penulis dapatkan, bahwasanya selama lebih kurang empat tahun berjalannya program pelayanan SIM keliling oleh Polresta Padang yakni dari tahun 2008 hingga tahun 2011, pada tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan terhadap angka produksi SIM pada unit pelayanan SIM keliling ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Rekap Produksi SIM**

<b>Tahun</b>	<b>SIM A</b>	<b>SIM C</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
2008	7.233	8.217	15.450	
2009	6.728	8.854	15.582	
2010	1.767	3.057	4.824	
2011	2.301	3.995	6.296	

Sumber : Dokumen Sat Lantas Polresta Padang, 2011

Dari data diatas terlihat bahwasanya dari tahun 2008 ke tahun 2009, jumlah produksi SIM pada unit pelayanan SIM keliling Polresta Padang terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup drastis terhadap angka produksi SIM pada unit pelayanan SIM keliling Polresta Padang ini. Begitu juga pada tahun 2011 jumlah produksi SIM pada unit pelayanan SIM keliling Polresta Padang juga lebih sedikit dibandingkan tahun 2008 hingga tahun 2009. Terjadinya penurunan terhadap angka produksi SIM pada unit pelayanan SIM keliling tersebut dapat saja dipengaruhi oleh masalah-masalah yang telah penulis paparkan di atas.

Dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “*Optimalisasi Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Pada Polresta Padang*”.

## **B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling Polresta Padang.
- b. Belum jelasnya rincian biaya pelayanan pada unit pelayanan SIM keliling Polresta Padang.
- c. Masih minimnya SDM petugas yang beroperasi pada unit pelayanan SIM keliling Polresta Padang.
- d. Masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang.
- e. Masih kurang maksimalnya upaya-upaya yang dilakukan pihak Polresta Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dari berbagai identifikasi masalah di atas, maka dibatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan pelayanan SIM keliling pada Polresta Padang, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan SIM keliling



Polresta Padang serta upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di Polresta Padang?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling Polresta Padang?
- c. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini terfokus dan tidak mengambang karena mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis, serta untuk mempertajam pembahasan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan standar pelayanan publik pada pelayanan SIM keliling Polresta Padang, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang serta upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan pada pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling Polresta Padang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan sosial khususnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dan manajemen pelayanan publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepala Polresta Padang untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling Polresta Padang.

- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang pelayanan SIM keliling Polresta Padang ini.
- c. Bahan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling Polresta Padang.